KETERBUKAAN INFORMASI
PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK.
("PERSEROAN")

Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, yang merupakan lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 ("**Peraturan No. IX.E.2**") dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang merupakan lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 ("**Peraturan No. IX.E.1**").

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan, peridustrian dan perdagangan umum.

Kantor Pusat:
Wisma Millenia, Lantai 7
Jl. M.T. Haryono Kav. 16
Jakarta 12810, Indonesia
Telepon: (021) 285 45 680 (hunting)
Faksimili: (021) 831 0309
Email: corsec@japfacomfeed.co.id
Website: www.japfacomfeed.co.id

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2017

DEFINISI

Anak Perusahaan Penjamin: BLT, STP, ALM, KW, CA, Wabin, VSN, Apachee, JIL, TIP, SA, ASF, AJS, JMI, BMS, dan MMP.

Akuntan Publik: Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, anggota dari Moore Stephens International Limited, yang melakukan audit terhadap (i) laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan anak perusahaannya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016, dan (ii) pemeriksaan terbatas pada laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan anak perusahaannya untuk periode yang berakhir 31 Maret 2017.

AJS: PT Agrinusa Jaya Santosa, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 100% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan.

ALM: PT Artha Lautan Mulya, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 100% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan.

Apachee: Apachee Pte Ltd, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura, dimana sebanyak 100% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan.

ASF: PT Austasia Stockfeed, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 100% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan.

Biro Administrasi Efek: PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

BLT: PT Bintang Laut Timur, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 100% sahamnya dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh Perseroan.

BMS: PT Bhirawa Mitra Sentosa, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 100% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan.

CA: PT Ciomas Adisatwa, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 99,99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan.

Direktur: Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini dibuat.

Kemenkumham: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

JIL: PT Japfa Indoland, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 100% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan.

JMI: PT Jakamitra Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 100% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan.

Keterbukaan Informasi: Keterbukaan informasi ini yang diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dalam rangka memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan No. IX.E.2 dan Peraturan No. IX.E.1 dan setiap informasi tambahan dalam Keterbukaan Informasi yang telah tersedia.

Komisaris: Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dibuat.

KW: PT Kraksaan Windu, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 100% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan.

Laporan Keuangan 2016: Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan anak perusahaannya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

Laporan Keuangan 2017: Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan anak perusahaannya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

Kurs Tengah Rupiah: kurs tengah Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada 31 Maret 2017, dimana 1 US$ setara dengan Rp 13.321.

Menkumham: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

MMP: PT Multi Makanan Permai, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 100% sahamnya dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh Perseroan.

Otoritas Jasa Keuangan atau **OJK:** lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("**UU OJK**"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

Pembeli Awal: Credit Suisse (Singapore) Limited.

Pemegang Saham: Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

Penilai Independen: Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan, yang telah ditunjuk Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran terhadap Transaksi.

Peraturan No. IX.E.1: Peraturan dahulu Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2: Peraturan dahulu Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Perseroan: PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk., suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

SA: PT Santosa Agrindo, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 100% sahamnya dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh Perseroan.

STP: PT Suri Tani Pemuka, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 100% sahamnya dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh Perseroan.

Surat Utang Lama: Surat Utang Senior yang diterbitkan Perseroan sebesar US$ 150.000.000 (seratus lima puluh juta dollar AS) dengan bunga sebesar 5,5% (lima koma lima persen) dan jatuh tempo pada 31 Maret 2022, yang diterbitkan kepada investor diluar wilayah Indonesia yang tunduk pada *Regulation S* berdasarkan *United States Securities Act 1933*, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

Surat Utang Lanjutan: Surat Utang Senior yang diterbitkan Perseroan sebesar Surat Utang Senior sebesar US$ 100.000.000 (seratus juta dollar AS) dengan bunga sebesar 5,5% (lima koma lima persen) dan jatuh tempo pada 31 Maret 2022, yang diterbitkan kepada investor di luar wilayah Indonesia yang tunduk pada *Regulation S* dari *United States Securities Act 1933*, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, dan akan di konsolidasikan serta merupakan suatu kesatuan dengan Surat Utang Lama.

Surat Utang 2018: Surat Utang Senior yang telah diterbitkan Perseroan sebesar US$ 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta dollar AS) dengan bunga sebesar 6,0% (enam koma nol persen) dan jatuh tempo pada 2 Mei 2018 yang ada saat iniyang diterbitkan kepada investor diluar wilayah Indonesia yang tunduk pada *Regulation S* berdasarkan *United States Securities Act 1933*, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

Transaksi: Penerbitan Surat Utang Lanjutan oleh Perseroan yang dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari Anak Perusahaan Penjamin.

***Trustee*:** Bank of New York Mellon, Cabang London.

TIP: PT Tretes Indah Permai, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 100% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan.

VSN: PT Vaksindo Satwa Nusantara, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 100% sahamnya dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh Perseroan.

Wabin: PT Wabin Jayatama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 100% sahamnya dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh Perseroan.

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan Surat Utang Lanjutan sebesar US$ 100.000.000 (seratus juta dollar AS) pada 19 Juni 2017 kepada investor di luar wilayah Indonesia dengan tunduk pada *Regulation S* berdasarkan *United States Securities Act 1933*, sebagaimana diamandemen dari waktu ke waktu ("**Surat Utang Lanjutan**"). Untuk menjamin kewajiban Perseroan atas pembayaran kembali Surat Utang Lanjutan, penerbitan Surat Utang Lanjutan tersebut dijamin oleh Anak Perusahaan Penjamin, dimana pemberian jaminan perusahaan oleh Anak Perusahaan Penjamin merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari penerbitan Surat Utang Lanjutan.

Surat Utang Lanjutan merupakan suatu rangkaian transaksi dengan Surat Utang Lama yang diterbitkan Perseroan pada 31 Maret 2017 sebesar US$ 150.000.000 (seratus lima puluh juta dollar AS) dengan bunga sebesar 5,5% (lima koma lima persen) dan jatuh tempo pada 31 Maret 2022 yang diterbitkan kepada investor diluar wilayah Indonesia yang tunduk pada *Regulation S* berdasarkan *United States Securities Act 1933*, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("**Surat Utang Lama**"). Surat Utang Lama dijamin oleh Anak Perusahaan Penjamin.

Penerbitan Surat Utang Lanjutan sebesar US$ 100.000.000 (seratus juta dollar AS) atau setara dengan Rp 1.332.100.000.000 (satu triliun tiga ratus tiga puluh dua milyar seratus juta Rupiah) (berdasarkan Kurs Tengah Rupiah) yang akan dikonsolidasikan dan merupakan suatu kesatuan dengan Surat Utang Lama sehingga keseluruhan Surat Utang Senior yang jatuh tempo 2022 berjumlah US$ 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta dollar AS) atau setara dengan Rp 3.330.250.000.000 (tiga triliun tiga ratus tiga puluh milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah) (berdasarkan Kurs Tengah Rupiah) ("**Jumlah Kombinasi**"). Jumlah Kombinasi tersebut masih bernilai lebih daripada 20% (dua puluh persen) namun di bawah 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan 2016.

Pemberian jaminan oleh Anak Perusahaan Penjamin kepada Perseroan sehubungan dengan penerbitan Surat Utang Lanjutan (dan juga Surat Utang Lama) merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Namun demikian, dikarenakan Transaksi juga merupakan suatu transaksi material, dengan demikian sesuai dengan angka 5.a.1 dari Peraturan No. IX.E.1, Perseroan hanya perlu untuk memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan No. IX.E.2.

Dokumen yang melandasari penerbitan Surat Utang Lanjutan adalah *Indenture* yang telah ditandatangani oleh dan antara Perseroan, Anak Perusahaan Penjamin dan *Trustee* untuk penerbitan Surat Utang Lanjutan. Akibatnya, syarat dan ketentuan yang berlaku untuk Surat Utang Lanjutan akan tetap sama dengan Surat Utang Lama.

Lebih lanjut lagi, Transaksi telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip kewajaran (*arm's length basis*), dan Transaksi juga telah dinyatakan sebagai transaksi yang wajar berdasarkan sebuah pendapat kewajaran yang dikeluarkan oleh Penilai Independen. Ringkasan dari pendapat kewajaran tersebut dimuat dalam Bagian V Keterbukaan Informasi ini. Oleh karenanya, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, bersama-sama dan masing-masing, dengan ini menyatakan bahwa Transaksi ini bukan merupakan Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.

Sesuai dengan Peraturan No. IX.E.2 dan Peraturan No. IX.E.1, Direksi Perseroan bermaksud agar Keterbukaan Informasi ini memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hasil pelaksanaan Transaksi.

II. LATAR BELAKANG DAN MANFAAT TRANSAKSI

Perseroan merupakan perusahaan induk dari kelompok usaha yang memiliki rekam jejak yang terbukti dan pengalaman yang panjang di Indonesia dengan portfolio bisnis yang mencakup sektor pertanian, peternakan, perikanan, peridustrian dan perdagangan umum.

Adapun manfaat dari Transaksi bagi Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Perseroan akan terhindar dari penurunan likuiditas berupa resiko pembiayaan jangka pendek dan menjadi pembiayaan jangka panjang dengan harga wajar, yaitu dari semula memiliki kewajiban pembayaran pinjaman modal kerja yang akan jatuh tempo kurang lebih 1 (satu) menjadi 5 (lima) tahun;
b. Perseroan dapat memanfaatkan kembali dana yang dihasilkan dari operasional, yang semula akan digunakan untuk membayar pinjaman modal kerja, untuk menjalankan kegiatan usahanya yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Perseroan yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi pemegang saham Perseroan;
c. Perseroan dapat menggunakannya untuk membiayai belanja modal saat ini, yang akan memberikan kesempatan kepada Perseroan untuk secara wajar mengembangkan kegiatan usahanya, dalam harapan untuk memperoleh keuntungan lebih banyak di masa yang akan datang dan persaingan usaha; dan
d. dengan penerbitan Surat Utang Lanjutan dan bersama dengan Surat Utang Lama, Perseroan akan memperoleh pembiayaan jangka panjang selama 5 tahun yang menggantikan Surat Utang 2018 yang sepenuhnya telah dibayar, namun dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga 6% pada Surat Utang 2018 menjadi bunga 5,5% pada Surat Utang Lanjutan. Oleh Karena itu, Surat Utang Lanjutan akan mengurangi resiko Perseroan dalam hal terjadi kekurangan likuiditas.

III. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI

A. Objek Transaksi

Objek dari Transaksi adalah penerbitan Surat Utang yang dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang diberikan oleh Anak Perusahaan Penjamin untuk menjamin kewajiban keuangan Perseroan, dalam jumlah sebesar US$ 100.000.000 (seratus juta dollar AS). Surat Utang tersebut telah dicatatkan pada dan diperdagangkan di SGX-ST.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Surat Utang yang telah diterbitkan:

1. **Penerbit**:
   PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
2. **Nilai**:
   US$ 100.000.000 (seratus juta dollar AS).
3. **Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok**:
   31 Maret 2022.
4. **Bunga**:
   Tingkat bunga tetap sebesar 5,5% per tahun.
5. **Jatuh Tempo Pembayaran Bunga**:
   Bunga akan dibayarkan secara semi-tahunan (*semi-annual*) pada tanggal 31 Maret dan 30 September setiap tahun, dimulai sejak tanggal 30 September 2017.
6. **Nilai Penjaminan**:
   US$ 100.000.000 (seratus juta dollar AS).
7. **Pembatasan-pembatasan**:
   Sebagaimana umumnya berlaku pada penerbitan surat utang sejenis, pembatasan-pembatasan yang lazim juga akan berlaku terhadap Perseroan dan anak perusahaan yang dibatasi sebagaimana lebih lanjut diperinci di dalam *Indenture*, sebagai suatu perjanjian yang menjadi dasar dari penerbitan Surat Utang Lanjutan.
   Penerbitan Surat Utang Lanjutan tunduk pada *Indenture* yang sama yang berlaku pula untuk Surat Utang Lama. Oleh karenanya, pembatasan-pembatasan dalam Surat Utang Lama juga dapat dilaksanakan terhadap Surat Utang Lanjutan, antara lain:
   a. Pembatasan dalam memperoleh pinjaman baru;
   b. pembatasan untuk pembagian dividen dan pembayaran lainnya yang dilarang;
   c. pembatasan penjualan aset-aset tertentu;
   d. Pembatasan untuk menerbitkan dan menjual saham dari Comfeed Finance B.V., Comfeed Trading B.V., BLT, STP, ALM, KW, CA, Wabin, VSN, Apachee, JIL, TIP, SA, ASF, AJS, JMI, BMS, MMP;
   e. pembatasan untuk mengadakan transaksi afiliasi tertentu;
   f. pembatasan untuk membebankan jaminan tertentu;
   g. pembatasan untuk mengadakan transaksi jual/sewa kembali tertentu;
   h. pembatasan terhadap kegiatan usaha;
   i. pembatasan untuk melakukan konsolidasi, penggabungan (*merger*), atau pengalihan seluruh atau sebagian besar asset;
   j. janji-janji untuk menyerahkan laporan-laporan keuangan tertentu
   Pembatasan-pembatasan sebagaimana disebutkan di atas tunduk kepada pengecualian-pengecualian dan kualifikasi-kualifikasi tertentu sebagaimana diatur secara terperinci di dalam *Indenture.*
8. **Dokumen-dokumen sehubungan dengan Transaksi**:
   Dokumen-dokumen utama lainnya sehubungan dengan Transaksi antara lain sebagai berikut:
   a. *Preliminary Offering Circular* tertanggal 12 Juni 2017*;*
   b. Perjanjian Pembelian (*Purchase Agreement*) tertanggal 12 Juni 2017 ditandatangani oleh dan antara Perseroan, Anak Perusahaan Penjamin dan Pembeli Awal; dan
   c. *Pricing Supplement* tertanggal 12 Juni 2017;
   d. *Final Offering Circular* tertanggal 19 Juni 2017*; dan*
   e. Dokumen-dokumen tambahan lainnya terkait dengan penerbitan Surat Utang Lanjutan.

B. Tujuan Penggunaan Dana

Pendapatan dari penerbitan Surat Utang Lanjutan setelah dikurangi dengan biaya dan komisi *underwriting* serta perkiraan pengeluaran sehubungan dengan Transaksi akan digunakan untuk melunasi pinjaman modal kerja yang ada, belanja modal dan tujuan umum perusahaan.

C. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

1. Perseroan;
2. Anak Perusahaan Penjamin;
3. Pembeli Awal, yaitu Credit Suisse (Singapore) Limited; dan
4. Trustee, yaitu Bank of New York Mellon, Cabang London;

D. Keterangan Singkat Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

1. Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan dalam rangka Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dengan nama PT Java Pelletizing Factory disingkat PT Japfa berdasarkan Akta No. 59 tanggal 18 Januari 1971 dan diubah dengan Akta No. 60 tanggal 15 Februari 1972 keduanya dibuat di hadapan Djojo Muliadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/39/8 tanggal 4 Oktober 1972, telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 905/1972 dan 906/1972 tanggal 14 Oktober 1972 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 Tambahan No. 641 tanggal 25 Oktober 1974.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48 tanggal 4 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0069240 tanggal 4 Agustus 2016 ("**Akta No. 48/2016**").

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 5 April 2017, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0126298 tanggal 11 April 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0047610.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 11 April 2017 ("**Akta No. 15/2017**"), berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Direksi

Direktur Utama	: Handojo Santosa
Wakil Direktur Utama	: Bambang Budi Hendarto
Direktur	: Tan Yong Nang
Direktur	: Koesbyanto Setyadharma
Direktur Independen	: Rachmat Indrajaya

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: H. Syamsir Siregar
Wakil Komisaris Utama	: Hendrick Kolonas
Komisaris	: Jaka Prasetya
Komisaris Independen	: Retno Astuti Wibisono
Komisaris Independen	: Ignatius Herry Wibowo
Komisaris Independen	: H. Achmad Syaifudin Haq

2. Anak Perusahaan Penjamin

BLT

BLT didirikan dengan nama PT Expedisi Muatan Kapal Laut Bintang Laut, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 49 tanggal 24 Februari 1968 yang telah diubah berdasarkan Akta Perubahan No. 80 tanggal 29 Agustus 1974, yang keduanya dibuat di hadapan R. Soebiono Danoesastro, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/355/12 tanggal 27 September 1974, telah didaftarkan di dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 1500/1974 tanggal 29 Oktober 1974 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 98 Tambahan No. 793 tanggal 6 Desember 1974.

Anggaran Dasar BLT telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 tanggal 6 Mei 2009, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-37423.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 5 Agustus 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0049487.AH.01.09. Tahun 2009 tanggal 5 Agustus 2009 ("**Akta No. 22/2009**"). Berdasarkan Akta No. 22/2009, para pemegang saham BLT telah menyetujui perubahan nama BLT dari semula bernama PT Expedisi Muatan Kapal Laut Bintang Laut menjadi PT Bintang Laut Timur.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 24 tanggal 11 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-26305.40.22.2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0086067.40.80.2014 tanggal 27 Agustus 2014 ("**Akta No. 24/2014**"), berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris BLT:

Direksi
Direktur Utama : Arif Widjaja
Direktur : Benjamin Soenadi Abednego

Dewan Komisaris
Komisaris : Antonius Tommy Gozali

STP

STP adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 17 tanggal 15 September 1987 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 2 tanggal 5 Januari 1988, keduanya dibuat di hadapan Nursetiani Budi, S.H., Notaris Pengganti dari Sastra Kosasih, Notaris di Surabaya, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-9404.HT.01.01.TH'88 tanggal 30 September 1988, dan telah didaftarkan di dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo di bawah No. W.10-Um.07.10-2-115/PT.1988, No. W.10-Um.07.10-2-117/PT.1988 dan No. W.10-Um.07.10-2-116/PT.1988 pada tanggal 22 Oktober 1988, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 17 Tambahan No. 295 tanggal 28 Februari 1989.

Anggaran Dasar STP telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 211 tanggal 28 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0001678.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0027745 tanggal 23 Januari 2017 dan keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0008701.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 ("**Akta No. 211/2016**"). Berdasarkan Akta No. 211/2016, para pemegang saham STP telah menyetujui peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor STP.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 69 tanggal 10 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0118820 tanggal 17 Maret 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dengan No. AHU-0036285. AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 17 Maret 2017 ("**Akta No. 69/2017**"), berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris STP:

Direksi
Direktur Utama : Ardi Budiono
Direktur : Freddy/Liem Hok Tiang
Direktur : Jenny Budiati/Tan Ay Lian
Direktur : Johannes Januar Prajugo

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Antonius Tommy Gozali
Komisaris : Wali Muhammad

ALM

ALM adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 7 April 1988, yang dibuat di hadapan Nansijani Sohandjaja S.H., Notaris di Situbondo, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7637-HT.01.01.TH'88 tanggal 25 Agustus 1988, telah didaftarkan di dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo di bawah No. 30/PT/1988/PN.Stb tanggal 15 Oktober 1988 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 Tambahan No. 331 tanggal 1 Febuari 1991.

Anggaran Dasar ALM telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 189 tanggal 16 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menkumham No. AHU-13518.40.20.2014 tanggal 24 Desember 2014, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-10257.40.21.2014 tanggal 24 Desember 2014 terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-013516440.80.2014 tanggal 24 Desember 2014 ("**Akta No. 189/2014**"). Berdasarkan Akta No. 189/2014, para pemegang saham ALM telah menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor ALM.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 4 tanggal 2 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0137634 tanggal 19 Mei 2017 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0064327.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 Mei 2017 ("**Akta No. 4/2017**"), berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris ALM:

Direksi
Direktur Utama : Ardi Budiono
Direktur : Freddy/Liem Hok Tiang

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Antonius Tommy Gozali
Komisaris : Johannes Januar Prajogo

KW

KW adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 24 September 1987 yang telah dirubah dengan Akta Perubahan No. 30 tanggal 9 Mei 1988, yang dibuat di hadapan M. Soenarko S.H., Notaris di Probolinggo, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8342.HT.01.01.Th'88 tanggal 9 September 1988, telah didaftarkan di dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan di bawah No. 03/1992/Not/PN.KAB. PROB tanggal 26 Maret 1992, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 45 Tambahan No. 2526 tanggal 5 Juni 1992.

Anggaran Dasar KW telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 180 tanggal 21 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0003732 tanggal 18 Januari 2016 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0006281.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016 ("**Akta No. 180/2015**"). Berdasarkan Akta No. 180/2015, para pemegang saham KW telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor KW, serta mengubah Pasa 4 ayat (2) Anggaran Dasar KW.

Berdasarkan Akta Keputusan Rapat No. 3 tanggal 2 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0137665 tanggal 19 Mei 2017 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0064367.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 Mei 2017 ("**Akta No. 3/2017**"), berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris KW:

Direksi
Direktur : Subianto Abet

Dewan Komisaris
Komisaris : Ardi Budiono

CA

CA adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 290 tanggal 25 Mei 1987 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 171 tagal 19 April 1988, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7172.HT.01.01-TH.88 tanggal 13 Agustus 1988, telah didaftarkan di dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1895/1988 dan No. 1896/1988 pada tanggal 24 Agustus 1988 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 Tambahan No. 968 tanggal 13 September 1988.

Anggaran Dasar CA telah mengalami perubahan beberap